

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dekade tujuh puluhan telah menjadi awal dari timbulnya sistem Ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam dalam tatanan dunia Internasional. Pada masa itu pula kajian Ilmiah tentang Sistem Ekonomi Islam menjadi semakin marak untuk menjadi bahan diskusi pada kalangan akademisi diberbagai Universitas Islam.

Hasil kajian tersebut dalam tataran aplikatif mulai menuai hasilnya dengan didirikan Islamic Development Bank di Jeddah tahun 1975 yang diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam dikawasan Timur Tengah. Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa Sistem Ekonomi Islam adalah Bank Islam, padahal Sistem Ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, ekonomi mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, Public Finance, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumen lainnya.

Keraguan banyak pihak tentang eksistensi Sistem Ekonomi Islam sebagai model alternatif sebuah sistem tak terelakkan. Pandangan beberapa pakar mengatakan Sistem Ekonomi Islam hanyalah akomodasi dari Sistem Kapitalis dan Sosialis yang nyaring disuarakan, tetapi hal tersebut terbantahkan baik melalui pendekatan historis dan faktual karena dalam kenyataanya, terlepas dari beberapa kesamaan dengan sistem ekonomi lainnya terdapat karakteristik khusus bagi Sistem Ekonomi Islam sebagai landasan

bagi terbentuknya suatu sistem yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sistem Ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian Sistem tersebut dengan Fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah yang pada akhirnya menjadikan tidak terjadi benturan-benturan dalam Implementasinya.

Kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dari prinsip sistem ekonomi Islam. Kebebasan memiliki unsur penting dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak Sistem Sosial yang ada.

Pada prinsipnya manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal. Dalam sistem perekonomian Islam persaingan bebas menjadi ciri Islam dalam menggerakkan perekonomian, pasar adalah cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang di representasikan oleh harga, tetapi kebebasan ini haruslah ada aturan main sehingga kebebasan tersebut tidak cacat, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja

mempermainkan adanya larangan dalam bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu. Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini, karena yang pertama terikat kepada nilai-nilai Islam dan yang kedua memisahkan diri dari agama semenjak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi. Sungguhpun demikian, tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia, tetapi pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai duniawi semata (*profane, mundane*).

Kata syari'ah dalam ekonomi syari'ah (ekonomi Islam) sebenarnya adalah fiqh para fuqaha'. Hal itu karena salah satu pengertian syari'ah yang berkembang dalam sejarah adalah fiqh dan bukan ayat-ayat dan/atau hadits-hadits semata sebagai inti agama Islam atau ayat-ayat dan/atau hadits-hadits hukum saja secara khusus. Pemakaian kata syari'ah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syari'ah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim (dan juga pada 7 kata dalam Piagam Jakarta), perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, ekonomi dan keuangan syari'ah secara umum di Indonesia, serta Pengadilan Syari'ah (Mahkamah Syar'iyah) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Secara lebih luas pengertian ekonomi Islam merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu

masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW., serta ijma' dan qiyas.

Islam memang sebagai suatu sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut. Hal ini termasuk juga dalam sistem pegadaian syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian yang ada dalam Islam.

Pegadaian syariah menjadi nilai tawar dari sistem ekonomi Islam mengingat selama ini gadai syariah masih banyak menjadi rujukan dari masyarakat dalam melakukan transaksi gadai. Lantas yang menjadi pertanyaan selanjutnya mungkinkah sistem gadai syariah mampu menawarkan suatu pandangan yang baru dalam hal mensejahterakan masyarakat.

Tujuan mensejahterakan masyarakat inilah yang akan peneliti ulas dalam penelitian ini. Dalam perspektif tujuan menjalankan perilaku ekonomi, kesejahteraan menjadi prioritas utama. Kesejahteraan juga menjadi tolak ukur atas mampu atau tidaknya diberikan legalitas untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan kemaslahatan umat manusia (pegadaian syariah) dibandingkan sistem yang telah ada (pegadaian konvensional).

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi latar belakang munculnya model gadai syariah yang berkembang di Indonesia dewasa ini ?
2. Bagaimana produk gadai syariah yang diterapkan oleh BRI syariah pada kantor cabang Kudus ?
3. Bagaimana upaya optimalisasi produk gadai syariah yang diterapkan oleh BRI syariah cabang Kudus dalam upaya menjalankan misi mensejahterakan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menemukan jawaban atas latar belakang munculnya model gadai syariah yang berkembang di Indonesia.
2. Untuk menemukan jawaban dan menganalisis atas produk gadai syariah yang diterapkan oleh BRI syariah kantor cabang Kudus.
3. Untuk melakukan analisis serta melakukan kajian secara komprehensif atas optimalisasi produk gadai syariah yang diterapkan oleh BRI syariah cabang Kudus dalam upaya menjalankan misi mensejahterakan masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini pada nantinya adalah sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan sarana untuk mendiskripsikan perkembangan perilaku ekonomi yaitu dalam hal produk gadai khususnya gadai dengan sistem syariah
2. Dapat dijadikan referensi penelitian yang akan datang dan untuk rujukan atas pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi terkait masalah penerapan gadai syariah.
3. Dapat dijadikan sarana untuk lebih meningkatkan potensi-potensi yang terkandung di dalam model gadai syariah yang ada dalam meningkatkan mutunya mensejahterakan masyarakat secara global

